HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: SELASA
03 NOVEMBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989



Laporan: PRASETYO M, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mulai memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul keluhan masyarakat mengenai antrean panjang, dugaan penimbunan, dan kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer. Meski pelayanan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai kembali normal, pemerintah memberikan tenggat satu hingga dua hari kepada pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi untuk mematuhi ketentuan penjualan BBM.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengatakan, perbaikan pelayanan terlihat setelah aktivitas pengisian BBM di SPBU dimulai sejak pukul 06.00 WITA. Kondisi tersebut dinilai membantu mengurai antrean kendaraan yang sebelumnya mengganggu masyarakat. Hal itu disampaikannya seusai melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPBU di Kota Baubau, Jumat (30/10/2026).

"Sekarang saya lihat sudah agak normal, karena memang pengisian di SPBU juga sudah sejak jam enam. Jadi, sekarang antrean sudah mulai terkendali. Mudah-mudahan pelayanan yang baik ini bisa berlangsung terus," kata Yusran.

Di tengah perbaikan pelayanan, pemerintah masih menyoroti dugaan praktik penimbunan dan penjualan BBM dengan harga tinggi oleh pengecer. Yusran mengatakan, pendekatan persuasif menjadi langkah awal sebelum pemerintah mempertimbangkan penindakan. Ia juga menegaskan bahwa penertiban tidak dimaksudkan untuk serta-merta memutus mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha pengecer, selama kegiatan tersebut berlangsung secara tertib.

"Sekarang kita imbau dulu, jangan

Lanjut ke Hal: 7

Buton Selatan Perkuat Pencegahan Malaria, 1.000 Kelambu Berinsektisida Disalurkan



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sebanyak 1.000 unit kelambu berinsektisida diterima pemerintah daerah dari Anggota DPD RI Daerah

Lanjut ke Hal: 7

PELNI Baubau Beralih ke Tiket Digital, 14 Agen Perjalanan Tak Lagi Bermitra



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Baubau akan mengakhiri penjualan tiket penumpang secara langsung di loket dan menghentikan kemitraan dengan 14 agen perjalanan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini menandai peralihan layanan penjualan tiket kapal menuju sistem digital melalui aplikasi PELNI Mobile dan kanal pembayaran resmi.

Penghentian kemitraan tersebut mencakup 12 agen perjalanan di Kota Baubau dan dua agen di luar daerah. Kepala Cabang PELNI Baubau, M. Lutfi Israr Sutan, mengatakan berakhirnya

Lanjut ke Hal: 7

Site Plan SNT Buton Tengah Segera Dirilis, Bupati Azhari Perkuat Koordinasi dengan Kemendikdasmen



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP-Rencana pembangunan Gedung Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Buton Tengah memasuki tahapan penting. Pemerintah daerah kini mengawal penyiapan dokumen perencanaan setelah site plan pembangunan tersebut dijadwalkan segera dirilis bersama 31 daerah lainnya pada tahun anggaran 2026.

Untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai rencana, Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menemui Direktur Sekolah Terintegrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nandana Aditya Bhaswara, S.ST., M.MM., di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan program sekaligus langkah percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan terpadu di Buton Tengah.

Dalam pertemuan itu, Azhari menekankan kesiapan pemerintah daerah untuk mengawal seluruh tahapan teknis, terutama setelah dokumen site plan resmi diterbitkan. Menurut dia, dukungan pemerintah pusat perlu diikuti kesiapan daerah agar program tersebut dapat berlanjut ke tahap pembangunan. "Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Kemendikdasmen. Dalam waktu dekat site plan pembangunan SNT Buton Tengah akan segera dirilis bersama 31 daerah lainnya, dan Pemk-

Lanjut ke Hal: 7

BWS Hibahkan Aset Irigasi Rp8,85 Miliar ke Baubau, Anggaran 2026 Diproyeksi Naik



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menerima hibah aset infrastruktur jaringan irigasi air tanah (JIAT) senilai Rp8.857.500.000 dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Sulawesi Tenggara. Penyerahan aset tersebut menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang peningkatan anggaran pembangunan jaringan irigasi di Baubau hing-

Lanjut ke Hal: 7

Selasa, 03 November 2026 — BAUB AU POST — www.baubaupost.com

Prabowo Dorong Pendidikan Merata untuk Mencetak Generasi Pemimpin Berkualitas



Prabowo Dorong Pendidikan Merata untuk Mencetak Generasi Pemimpin Berkualitas

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia unggul harus dimulai melalui sistem pendidikan berkualitas dan seleksi calon pemimpin yang menyeluruh. Pemimpin masa depan, menurut dia, tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga harus unggul secara fisik, mental, dan karakter.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya lembaga pendidikan yang mampu menjaring putra-putri terbaik Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi.

Prabowo mengatakan, proses seleksi harus mampu mengidentifikasi berbagai potensi calon pemimpin, termasuk kualitas kepribadian dan integritas. Menurut dia, keunggulan seseorang tidak boleh hanya diukur berdasarkan prestasi akademis.

"Pemimpin yang unggul harus diseleksi yang baik. Seleksi yang baik unggul, tidak unggul hanya otaknya, unggul badannya, unggul jiwanya, unggul hatinya," kata Prabowo.

Ia menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni membangun negara yang berkeadilan dan memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berkembang.

Prabowo menilai pendidikan tidak semestinya dimulai ketika anak memasuki bangku sekolah. Pembentukan kualitas manusia harus berlangsung sejak lingkungan keluarga, bahkan sejak sebelum kelahiran, kemudian berlanjut melalui pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi.

Pandangan tersebut sejalan dengan perjalanan sejarah pendidikan Indonesia. Sejak masa pergerakan nasional, pendidikan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kesadaran kebangsaan. Pendirian Taman Siswa oleh Ki Hadjar Dewantara pada 1922, misalnya, menjadi bagian penting dari perjuangan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat pribumi.

Dalam konteks internasional, gagasan pemerataan pendidikan juga memperoleh landasan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948. Pasal 26 deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Prinsip itu kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam pembangunan sistem pendidikan di berbagai negara.

Prabowo menegaskan, kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas di Indonesia harus terbuka bagi seluruh anak bangsa, tanpa memandang kemampuan ekonomi, suku, ras, maupun agama. Semangat kesetaraan tersebut, kata dia, menjadi salah satu dasar pendirian SMA Taruna Nusantara untuk menjaring bibit unggul dari berbagai wilayah Indonesia.

Ia berharap para lulusan lembaga pendidikan tersebut mampu menghasilkan karya, penemuan, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi nasional.

"Bibit-bibit unggul ini, hasil daripada lembaga ini akan berkarya, akan berbuat, akan memberi kebaikan untuk negara, akan memberi penemuan untuk negara, akan memberi kekayaan untuk negara," ujarnya.

Selain menekankan pembangunan pendidikan, Presiden mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kekayaan negara, menurut dia, harus diamankan agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Prabowo juga mengingatkan bahwa investasi pendidikan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pengelolaan kekayaan negara masih diwarnai korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, integritas penyelenggara negara menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

"Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, sesungguhnya adalah awal kehancuran bangsa," tegasnya. (*)

Sultan Najamudin Ajak Investor China-Rusia Kembangkan Properti dan Pariwisata RI



Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengajak investor asing dan pelaku industri properti global berkolaborasi mengembangkan perumahan

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Indonesia membuka peluang kerja sama investasi internasional untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengembangkan kawasan pariwisata baru. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengajak investor dari China, Rusia, Jerman, India, dan negara lainnya mengambil bagian dalam pengembangan sektor properti nasional melalui dukungan pembiayaan dan transfer teknologi konstruksi.

Ajakan tersebut disampaikan Sultan saat membuka Indonesia-China Bridge Forum di Bali, Kamis (29/10/2026). Forum internasional itu dihadiri lebih dari 500 pelaku industri properti dari berbagai negara yang membahas peluang investasi dan kolaborasi pengembangan sektor properti.

Sultan mengatakan, keterlibatan investor global dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan alternatif sekaligus menghadirkan teknologi konstruksi modern. Menurut dia, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Indonesia terbuka terhadap investasi dan teknologi negara-negara sahabat di bidang properti perumahan," ujar Sultan dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

Salah satu teknologi yang ditawarkan untuk mendukung percepatan pembangunan hunian adalah 3D construction printing. Teknologi ini menggunakan sistem pencetakan tiga dimensi dengan material konstruksi, seperti beton, untuk membentuk bagian bangunan secara lebih terotomatisasi. Pemanfaatannya dinilai berpotensi mempercepat proses pembangunan dan menekan biaya konstruksi.

Gagasan pemanfaatan teknologi pencetakan bangunan sebenarnya telah berkembang secara internasional sejak awal 2000-an. Pada 2006, peneliti Behrokh Khoshnevis dari University of Southern California memperkenalkan sistem Contour Crafting, sebuah teknologi pencetakan bangunan menggunakan material beton. Perkembangan berikutnya terlihat di Dubai, Uni Emirat Arab, ketika sebuah gedung komersial pertama yang dibangun menggunakan teknologi cetak 3D tercatat selesai pada Februari 2020.

Di Indonesia sendiri, keterlibatan pemerintah dalam penyediaan perumahan telah memiliki perjalanan panjang. Salah satu tonggak pentingnya adalah pembentukan Perum Perumnas pada 1974 sebagai lembaga yang menjalankan misi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mulai memperkuat pembiayaan kepemilikan rumah melalui skema kredit perumahan yang kemudian berkembang menjadi program KPR BTN.

Meski berbagai kebijakan perumahan telah berjalan selama puluhan tahun, kebutuhan hunian nasional masih menjadi tantangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Agustus 2026 mencatat sekitar 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Sementara itu, sekitar 18,01 juta rumah tangga masih menempati rumah yang belum memenuhi kriteria layak huni. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan pembiayaan, teknologi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan perumahan.

Selain menyasar sektor hunian, Sultan juga mendorong investor internasional berkolaborasi mengembangkan destinasi pariwisata baru di berbagai daerah. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan properti, tetapi juga mendorong masuknya investasi, teknologi, serta aktivitas ekonomi baru di daerah.

Melalui Indonesia-China Bridge Forum, peluang kolaborasi antara Indonesia dan pelaku industri properti dunia diharapkan semakin terbuka. Keterlibatan investor dari China, Rusia, Jerman, India, dan negara lainnya menjadi salah satu upaya memperluas jaringan investasi untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan pariwisata nasional. (*)

Jelang Adipura, Pemkot Kendari Perkuat Armada Sampah dan Benahi Layanan Kebersihan



Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari memperkuat kesiapan pengelolaan persampahan menjelang penilaian Adipura dengan memastikan seluruh armada pengangkut sampah beroperasi optimal. Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, turun langsung melakukan inspeksi mendadak terhadap kendaraan pengangkut sampah di Lapangan Torada, Kecamatan Puuwatu, Rabu (28/10/2026).

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sekaligus memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam memenuhi indikator penilaian Adipura. Pemerintah Kota Kendari juga menargetkan penguatan sektor persampahan sebagai fondasi mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam peninjauan itu, Siska didampingi Sekretaris Daerah Kota Kendari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektur, serta Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari. Kehadiran jajaran pejabat tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan persampahan membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Wali Kota menegaskan, optimalisasi armada menjadi salah satu prioritas karena kebutuhan pelayanan persampahan terus berkembang seiring aktivitas masyarakat dan pertumbuhan kawasan perkotaan.

"Seluruh armada yang berkaitan dengan persampahan harus dioptimalkan, mulai dari truk pengangkut sampah konvensional hingga fasilitas pendukung lainnya," tegas Siska.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah, mulai dari kawasan permukiman warga hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Menurutnya, dinamika produksi sampah perkotaan menuntut pemerintah daerah untuk terus menyesuaikan kemampuan armada dan sistem pelayanan.

"Kebutuhan penanganan sampah di Kota Kendari dinilai sangat dinamis dan memerlukan perhatian yang berkelanjutan," ujar Siska.

Ia mengatakan, pembenahan sektor persampahan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan penilaian Adipura. Lebih dari itu, pemerintah ingin membangun sistem pengelolaan lingkungan yang mampu menjamin kebersihan kota secara konsisten.

Program Adipura sendiri memiliki sejarah panjang dalam kebijakan lingkungan hidup Indonesia. Diluncurkan pada 1986 melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, program tersebut awalnya diarahkan untuk mendorong terwujudnya kota bersih dan teduh. Program ini sempat terhenti pada 1998 akibat krisis ekonomi dan perubahan politik, sebelum kembali dilanjutkan pada 2002.

Dalam perkembangannya, penilaian Adipura tidak lagi sebatas melihat kebersihan fisik suatu kota. Aspek kelembagaan, tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Persoalan persampahan juga menjadi tantangan global. Laporan Bank Dunia bertajuk What a Waste 2.0 yang diterbitkan pada 2018 mencatat produksi sampah perkotaan dunia mencapai sekitar 2,01 miliar ton per tahun. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,40 miliar ton pada 2050 apabila tidak diimbangi perbaikan sistem pengelolaan. Data ini menunjukkan bahwa penguatan layanan persampahan merupakan kebutuhan penting bagi kota-kota di berbagai negara.

Bagi Kendari, target menjadi kota bersih dan berkelanjutan juga menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang. Siska menilai lingkungan yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan visual, melainkan mencerminkan kualitas kehidupan dan kemajuan peradaban masyarakat.

"Melalui sinergi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan kesadaran masyarakat, cita-cita besar ini optimistis dapat segera terwujud secara nyata," tutupnya.

Karena itu, pemerintah daerah berharap optimalisasi armada, peningkatan pelayanan pengangkutan, serta keterlibatan masyarakat dapat berjalan beriringan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Kendari dalam penilaian Adipura, tetapi juga menjadikan kebersihan sebagai budaya dan tanggung jawab bersama.(*)

Pemkot Kendari Siapkan Hibah Lahan 7,8 Hektare untuk Sekolah Rakyat



Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari menyiapkan hibah tanah seluas 78.611 meter persegi atau sekitar 7,86 hektare kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Saat ini, pemerintah daerah tengah mematangkan aspek legalitas, administrasi, dan teknis pertanahan agar penyerahan aset tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Persiapan hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di Ruang Rapat Sekda Kota Kendari, Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut peninjauan lapangan terhadap aset tanah milik pemerintah daerah di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu.

Lahan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21.05.000027004.0. Sebelum proses hibah dilaksanakan, Pemkot Kendari perlu memastikan kesesuaian data kepemilikan, luas tanah, batas wilayah, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Amir Hasan menegaskan, proses pengalihan aset daerah kepada pemerintah pusat harus dilakukan secara cermat dan transparan. Menurut dia, validasi dokumen menjadi tahapan penting untuk menghindari persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

"Proses hibah tanah ini perlu dipersiapkan secara cermat, mulai dari validasi data kepemilikan, penghitungan luas lahan, hingga kelengkapan dokumen administrasi. Dengan demikian, prosesnya dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Amir.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Setda Kota Kendari, Adriana Musarudin, Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam penyiapan administrasi dan dokumen pertanahan. Pembahasan juga mencakup pencocokan dokumen awal dengan kondisi faktual di lokasi, termasuk kemungkinan pemecahan sertifikat apabila dibutuhkan.

Untuk memperkuat akurasi data, Pemkot Kendari turut membahas pemanfaatan teknologi pemetaan digital dan dokumentasi foto. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan membantu memastikan batas-batas lahan dan luas tanah yang akan dihibahkan sehingga tidak terjadi perbedaan antara dokumen administrasi dan kondisi lapangan.

Rencana hibah ini berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas akses pendidikan dan pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Secara historis, Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan utama bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat tersebut juga sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang mengakui pendidikan sebagai hak setiap orang. Melalui penyiapan lahan ini, Pemkot Kendari berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat didukung dengan kepastian aset dan administrasi yang memadai.(*)

Selasa, 03 November 2026 — BAUB AU POST — www.baubaupost.com

Buton Tengah Bidik Desa Lagili Jadi Sentra Budidaya Lobster, Bupati Azhari Temui Sekjen Transmigrasi



Laporan:Ardi

JAKARTA, BP- Pengembangan budidaya lobster menjadi salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI, Dr. Edi Gunawan, S.E., M.M., di Jakarta, Kamis (29/10/2026), guna membahas pembentukan proyek percontohan ekonomi biru berbasis transmigrasi maritim di Desa Lagili.

Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Budidaya lobster dipilih sebagai komoditas yang diharapkan dapat menjadi salah satu unggulan dalam pengembangan kawasan transmigrasi maritim di Buton Tengah.

Dalam pertemuan itu, Azhari menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah memperjuangkan realisasi pilot project pengembangan ekonomi biru berbasis budidaya lobster. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mematangkan perencanaan dan pelaksanaan program agar pengembangan kawasan pesisir dapat berjalan secara terarah.

Sekjen Kementerian Transmigrasi, Edi Gunawan, dalam pertemuan tersebut turut menghadirkan Direktur Kawasan Transmigrasi, Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T., serta Kepala Biro Perencanaan, Imam Yunarto, Ak., M.Acc. Pembahasan bersama jajaran teknis kementerian tersebut difokuskan pada skema pengembangan wilayah dan langkah percepatan program Transmigrasi Maritim di Desa Lagili.

Azhari mengapresiasi perhatian dan respons jajaran Kementerian Transmigrasi yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk mendiskusikan rencana tersebut secara komprehensif. Ia berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat berlanjut hingga program tersebut memasuki tahap realisasi.

"Kami berjuang untuk membangun pilot project pengembangan ekonomi biru berbasis transmigrasi lobster di Desa Lagili. Terima kasih kepada Sekjen Kementerian Transmigrasi atas perhatian dan dukungannya. Semoga program ini berjalan lancar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Buton Tengah," ungkap Azhari.

Pengembangan kawasan transmigrasi sendiri bukan merupakan kebijakan baru dalam sejarah pembangunan Indonesia. Program ini berawal pada masa kolonial Belanda melalui kebijakan kolonisasi pada 1905. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan program perpindahan penduduk tersebut dengan orientasi pembangunan wilayah dan pemerataan kesejahteraan. Pemberangkatan transmigran pertama setelah kemerdekaan tercatat berlangsung pada 12 Desember 1950 dengan tujuan Lampung dan Lubuk Linggau.

Dalam perkembangannya, orientasi transmigrasi mengalami perubahan. Program yang sebelumnya banyak dikaitkan dengan persebaran penduduk kemudian diarahkan pula untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah padat penduduk. Transformasi inilah yang menjadi salah satu konteks pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi unggulan daerah.

Sementara itu, konsep ekonomi biru memperoleh perhatian internasional dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan atau Rio+20 di Brasil pada 2012. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) kemudian meluncurkan Blue Growth Initiative pada 2013 untuk mendorong pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian ekosistem.

Dalam konteks Buton Tengah, rencana pengembangan budidaya lobster di Desa Lagili menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi sumber daya pesisir dengan agenda pembangunan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan program tersebut nantinya juga akan bergantung pada kesiapan teknis budidaya, pengelolaan kawasan, keberlanjutan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat setempat.

Melalui pertemuan dengan jajaran Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap rencana proyek percontohan ekonomi biru tersebut memperoleh dukungan dan tindak lanjut teknis. Jika terealisasi, pengembangan budidaya lobster di Desa Lagili diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru di Buton Tengah.(*)

Bupati Alvin Gaungkan Semangat Patriotisme dan Persatuan pada Sumpah Pemuda ke-98 di Buton



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kabupaten Buton menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pembangunan karakter generasi muda di tengah perubahan zaman. Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., memimpin upacara peringatan yang berlangsung di Lapangan Alun-Alun Takawa, Pasarwajo, Rabu (28/10/2026), dengan mengusung tema nasional "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia" .

Dalam upacara tersebut, Alvin bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Pesan yang disampaikan menitikberatkan pada pembentukan generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, ketangguhan menghadapi tantangan, serta kepekaan terhadap persoalan sosial.

Menpora melalui sambutan yang dibacakan Bupati Alvin mengingatkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak cukup diukur dari pembangunan gedung, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan materi. Fondasi kemajuan justru terletak pada kualitas manusia, terutama karakter, kecintaan terhadap tanah air, dan kepedulian terhadap sesama.

"Kemajuan sejati dimulai dari manusia. Dari karakter, dari hati yang mencintai tanah air, dari jiwa yang tidak menyerah, dan dari kepedulian terhadap sesama. Karena itu, kita harus membentuk generasi masa depan yang patriotik, gigih, dan berempati," demikian petikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Alvin.

Selain menanamkan patriotisme, Menpora mengajak pemuda Indonesia untuk berani memiliki cita-cita besar dan bekerja keras mewujudkannya. Namun, kekuatan dan keberanian dalam menghadapi persaingan harus tetap disertai kelembutan hati serta kesediaan untuk mengabdi kepada masyarakat.

"Jadilah manusia yang kuat, tetapi jangan kehilangan kelembutan hati. Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani," demikian pesan Menpora dalam sambutannya.

Pesan tersebut sejalan dengan sejarah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Melalui Kongres Pemuda II di Jakarta yang berlangsung selama dua hari, 27-28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai organisasi dan latar belakang daerah menyatukan tekad melalui tiga ikrar: bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan nasionalisme Indonesia.

Secara internasional, perhatian terhadap peran pemuda juga telah berkembang sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1965 mengesahkan deklarasi mengenai penanaman nilai perdamaian, saling menghormati, dan pemahaman antarbangsa di kalangan generasi muda. PBB kemudian menetapkan 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional dengan tema Partisipasi, Pembangunan, dan Perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam pembangunan dan perdamaian merupakan perhatian global.

Upacara di Alun-Alun Takawa tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buton, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta pengurus organisasi kepemudaan daerah.

Peringatan Sumpah Pemuda ke-98 ini sekaligus mengingatkan bahwa persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa tidak boleh berhenti sebagai simbol sejarah dan seremoni tahunan. Nilai tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk meningkatkan kapasitas diri, menjaga toleransi, membangun kepedulian sosial, serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

Dengan semangat patriotisme, kegigihan, dan empati, generasi muda diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman sekaligus mengambil peran dalam menentukan masa depan Kabupaten Buton dan Indonesia.(*)

BPOM Raih Nilai Sempurna 100, Pertahankan Predikat Istimewa Reformasi Hukum



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mencatatkan prestasi dalam reformasi birokrasi dengan meraih nilai sempurna 100 dan predikat AA (Istimewa) pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026. Penghargaan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) tersebut menjadi pencapaian kelima BPOM dalam mempertahankan kategori tertinggi reformasi hukum, sekaligus memperkuat komitmen lembaga itu dalam meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan publik.

Penghargaan diserahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar yang diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BPOM Irwansyah. Penyerahan berlangsung dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 di Graha Pengayoman Kemenkum, Kamis (15/6/2026).

Capaian tersebut diperoleh melalui penilaian terhadap empat aspek utama tata kelola hukum. BPOM mendapatkan skor maksimal 25 untuk koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan, 25 untuk kompetensi perancang regulasi, 30 untuk kualitas regulasi ulang atau deregulasi, serta 20 untuk penataan basis data peraturan perundang-undangan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penilaian IRH merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan reformasi hukum berjalan secara terukur di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Semoga dengan tata kelola peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi rakyat dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, investasi yang lebih lancar, dan keadilan yang makin mudah dijangkau," kata Supratman.

Indeks Reformasi Hukum sendiri merupakan instrumen pemerintah untuk mengukur kualitas pembenahan tata kelola regulasi. Penilaian ini diarahkan untuk mendorong pembentukan peraturan yang efektif, transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam konteks historis, reformasi hukum di Indonesia memperoleh landasan penting setelah perubahan politik 1998. Agenda reformasi saat itu mendorong pembenahan kelembagaan negara, penguatan supremasi hukum, transparansi pemerintahan, serta pembentukan sistem birokrasi yang lebih bertanggung jawab. Perkembangan tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan reformasi birokrasi dan penataan regulasi di berbagai sektor pemerintahan.

Secara internasional, penguatan kualitas regulasi juga menjadi bagian penting dalam agenda tata kelola pemerintahan modern. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui pendekatan Regulatory Policy and Governance menekankan pentingnya regulasi yang berbasis bukti, transparan, konsisten, dan dievaluasi secara berkala agar kebijakan publik memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem pengelolaan regulasi, bukan sekadar pencapaian administratif. Ia menyatakan BPOM akan mempertahankan kualitas reformasi hukum melalui pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Kami akan mempertahankan predikat ini dengan terus melakukan perbaikan secara kontinu dalam hal pengelolaan peraturan perundang-undangan sehingga melalui peraturan yang dirilis oleh BPOM, dapat memaksimalkan pelayanan BPOM kepada masyarakat," ujar Taruna Ikrar.

Selain BPOM, penghargaan IRH 2026 diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada kesempatan yang sama, penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) diserahkan kepada BPK RI, Kementerian Pariwisata, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 turut dihadiri Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto. Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 16 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum oleh Supratman Andi Agtas bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Dhahana Putra.(*)

BPJS Kesehatan Bantah Isu Penghapusan JKN, Pelayanan Peserta Tetap Berjalan



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- BPJS Kesehatan memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan dan pelayanan kepada peserta berlangsung seperti biasa. Kepastian ini disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial dan dinyatakan tidak benar.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kabar tersebut. Menurut dia, JKN merupakan program negara yang penyelenggaraannya memiliki landasan hukum kuat dan bukan kebijakan sementara yang dapat dihentikan tanpa dasar peraturan perundang-undangan.

"Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan," ujar Rizzky, Selasa (27/10/2026).

Secara kelembagaan, BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, sistem JKN berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Landasan hukum tersebut mempertegas kedudukan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan mandat negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.

Ketentuan itu juga memiliki pijakan konstitusional. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial, sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Rizzky menjelaskan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 melalui Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur pembentukan dua badan penyelenggara, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beserta tugas masing-masing dalam menjalankan program jaminan sosial.

"Keberadaan dan tugas BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi," katanya.

Secara historis, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang pembangunan sistem perlindungan sosial. Salah satu tonggak pentingnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang kemudian diikuti pembentukan BPJS melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Program JKN mulai diselenggarakan pada 1 Januari 2014, menandai perubahan besar dalam sistem pembiayaan dan akses pelayanan kesehatan nasional.

Dalam konteks internasional, konsep jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi agenda penting Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Deklarasi Alma-Ata 1978 dan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya target 3.8, menempatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa kesulitan finansial sebagai salah satu sasaran pembangunan global.

BPJS Kesehatan menegaskan, fokus penyelenggaraan JKN saat ini adalah menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Peserta tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui Aplikasi Mobile JKN atau layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165. BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat memperoleh informasi melalui kanal resmi agar tidak terpengaruh kabar yang belum jelas sumber dan kebenarannya. (*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Kejagung Temukan Ruang Tersembunyi Saat Geledah Kantor PT IPPS, Ponsel Disita



Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT IPPS dalam penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT TPL.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL) periode 2008-2025 memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan akses menuju ruang tersembunyi di kantor PT Indo Partners Plantation Services (IPPS), Jakarta Pusat, saat menggeledah perusahaan tersebut pada 29-30 Oktober 2026. Penyidik turut menyita dokumen dan sejumlah barang bukti elektronik, termasuk telepon genggam yang diduga menyimpan percakapan terkait perkara tersebut.

Temuan ruang tersembunyi itu menjadi salah satu perhatian dalam penggeledahan yang dilakukan tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penyidik bahkan menyegel pintu lemari yang diketahui menjadi akses masuk menuju ruangan tersebut, sekaligus melakukan penyegelan terhadap kantor PT IPPS.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyitaan barang bukti elektronik dalam penggeledahan tersebut. Menurut dia, perangkat telepon genggam yang diamankan memuat percakapan yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

“Dalam handphone yang disita tersebut ditemukan bukti percakapan yang diduga berkaitan dengan perkara a quo,” kata Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).

Penggeledahan berlangsung sejak Kamis (29/10/2026) hingga Jumat dini hari di kantor PT IPPS, Menara Batavia Lantai 11, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain perangkat elektronik, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan penyidikan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi transaksi ekspor PT TPL melalui praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang diduga tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Kejagung menyebut perusahaan tersebut diduga melaporkan produk ekspornya sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Untuk memuluskan dugaan praktik tersebut, PT TPL diduga meminta bantuan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berinisial BP dan SR. Keduanya diketahui bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak perusahaan.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung telah menetapkan BP dan SR sebagai tersangka. Selain keduanya, Direktur sekaligus Corporate Secretary PT TPL, Anwar Lawden, juga ditetapkan sebagai tersangka. PT TPL turut dijerat sebagai tersangka korporasi.

Anang menegaskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi transfer pricing yang berlangsung selama kurun waktu 2008â€“2025.

“Dilakukan penyegelan terhadap kantor PT IPPS beserta pintu lemari yang menjadi jalan masuk ke ruang tersembunyi di kantor PT IPPS,” ujar Anang.

Jejak Historis Transfer Pricing

Praktik transfer pricing sebenarnya dikenal dalam aktivitas bisnis internasional, terutama transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di berbagai negara. Mekanisme ini digunakan untuk menentukan harga barang, jasa, maupun aset yang diperdagangkan antarperusahaan dalam satu kelompok usaha.

Namun, praktik tersebut dapat menjadi persoalan hukum apabila harga transaksi dimanipulasi untuk mengalihkan keuntungan ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah sehingga mengurangi kewajiban pajak di negara tempat kegiatan ekonomi berlangsung.

Secara internasional, persoalan penghindaran pajak melalui pengaturan harga transfer menjadi perhatian serius sejak Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengembangkan pedoman transfer pricing pada 1979. Isu tersebut kemudian semakin mengemuka melalui proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang diluncurkan OECD bersama negara-negara G20 pada 2013.

Di Indonesia, pengaturan transfer pricing antara lain mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pengawasan juga diperkuat melalui ketentuan dokumentasi penentuan harga transfer.

Perkara PT TPL menjadi perhatian karena penyidik mendalami dugaan penyimpangan transaksi ekspor dan keterlibatan pihak internal perusahaan maupun aparatur perpajakan. Penggeledahan kantor PT IPPS, penyitaan perangkat elektronik, serta penemuan akses menuju ruang tersembunyi diharapkan dapat membantu mengungkap aliran informasi dan bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.(*)

Kapolri Minta Polri Perkuat Integritas dan Pelayanan, Pelanggaran Tak Boleh Ditutupi



Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mewanti-wanti kepada seluruh jajarannya untuk menjadi anggota Polri yang berintegritas.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik sebagai fondasi membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan para calon pemimpin kepolisian agar tidak melindungi anggota yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk penyimpangan yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

Arahan tersebut disampaikan Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Jumat (30/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kecerdasan dan kemampuan teknis seorang anggota kepolisian harus disertai kejujuran serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan.

Dalam arahannya, Suyudi menyoroti pentingnya pengawasan internal untuk memastikan tidak ada anggota yang kebal terhadap proses hukum. Ia menilai, pembiaran terhadap penyimpangan, terutama jika melibatkan oknum dalam peredaran narkotika, berpotensi merusak institusi dan menghambat penegakan hukum.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan etika,” ujarnya.

Ia juga meminta personel kepolisian menghindari tindakan kasar, membentak, maupun mengintimidasi masyarakat ketika menangani perkara. Perlindungan data pribadi serta penghormatan terhadap hak tersangka, saksi, dan korban harus menjadi bagian dari standar pelaksanaan tugas kepolisian.

Suyudi menegaskan, keberhasilan institusi kepolisian tidak cukup diukur berdasarkan jumlah operasi maupun penangkapan. Kepastian penanganan perkara, kualitas pelayanan, pemulihan hak korban, dan meningkatnya rasa aman masyarakat juga harus menjadi indikator keberhasilan.

Karena itu, seluruh anggota diminta terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial maupun WhatsApp harus direspons serta diteruskan kepada satuan yang berwenang agar memperoleh penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam pembenahan kelembagaan, Kapolri turut mengarahkan perampingan struktur Mabes Polri dan penguatan personel di tingkat kewilayahan. Polsek menjadi perhatian karena merupakan satuan terdepan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Mabes itu harus ramping, Polda harus kuat, Polres harus besar, Polsek harus tangguh,” katanya.

Penekanan terhadap integritas tersebut memiliki relevansi dengan perjalanan reformasi kepolisian di Indonesia. Setelah reformasi 1998, Polri dipisahkan dari ABRI pada 1 April 1999. Perubahan itu kemudian diperkuat melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan fungsi Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Code of Conduct for Law Enforcement Officials melalui Resolusi Majelis Umum 34/169 pada 17 Desember 1979. Pedoman tersebut menekankan kewajiban aparat penegak hukum untuk melayani masyarakat, melindungi setiap orang dari tindakan melanggar hukum, serta menjalankan kewenangan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini menjadi salah satu rujukan historis penting mengenai etika dan profesionalisme kepolisian di berbagai negara.

Suyudi menegaskan, penguatan organisasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur dan penempatan personel. Integritas serta profesionalisme harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan kewenangan kepolisian agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan kepastian penegakan hukum yang berkeadilan.(*)

Turun angsung ke SPBU, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Peringatkan Pengecer BBM, Penindakan Disiapkan dalam Dua Hari

langsung kita putus, karena seperti yang kita lihat selama ini banyak yang hidup dari situ. Kalau kondisinya normal, mereka bisa tetap berusaha sesuai dengan apa yang mereka lakukan," ujarnya.

Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., pada kesempatan yang sama mengingatkan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan barcode pembelian BBM bersubsidi. Keluhan yang diterima pemerintah antara lain kuota pembelian tercatat telah digunakan, meskipun pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian. "Barcode itu rahasia, ibarat PIN. Hanya pemiliknya yang boleh tahu. Jangan sampai tersebar dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut Wa Ode Hamsinah, petugas SPBU seharusnya mencocokkan barcode dengan nomor polisi kendaraan sebelum melayani pengisian. Namun, ketika antrean padat, pemeriksaan tersebut berpotensi tidak berjalan optimal sehingga membuka peluang penyalahgunaan identitas pembelian. Masyarakat pun diminta tidak membagikan barcode kepada orang lain dan menjaga kerahasiaan data kendaraannya.

Persoalan pengawasan BBM bersubsidi bukan hal baru di Indonesia. Pada 2005, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap di tengah tekanan anggaran subsidi. Sementara itu, pendaftaran program Subsidi Tepat untuk pembelian BBM menggunakan sistem barcode mulai dibuka Pertamina pada 1 Juli 2022 sebagai bagian dari upaya pendataan dan penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran.

Dalam konteks internasional, krisis minyak dunia 1973-1974 juga memperlihatkan bagaimana gangguan pasokan dapat memicu kelangkaan dan antrean panjang di berbagai negara. Embargo minyak oleh sejumlah negara produsen menyebabkan harga minyak dunia melonjak dan mendorong pembentukan Badan Energi Internasional (IEA) pada 1974 untuk memperkuat kerja sama keamanan pasokan energi. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan distribusi dan pengelolaan pasokan energi secara terukur.

Pemerintah Kota Baubau berharap penertiban pengecer, pengawasan SPBU, dan perlindungan data barcode dapat menjaga ketersediaan BBM serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar dengan harga yang wajar.(*)

BWS Hibahkan Aset Irigasi Rp8,85 Miliar ke Baubau, Anggaran 2026 Diproyeksi Naik



hingga sekitar Rp20 miliar pada Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) kegiatan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun Anggaran 2025 di Kantor BWS Wilayah IV Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (29/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., bersama Bupati Konawe Kepulauan.

Nilai hibah tersebut mencakup pembangunan tiga unit jaringan irigasi air tanah, masing-masing dua unit di Kampeonaho dan satu unit di Kaisabu. Selain itu, terdapat optimalisasi Bendungan Wonco 1, 2, dan 3 serta pembangunan jalan usaha tani. Infrastruktur tersebut diharapkan memperluas dukungan ketersediaan air bagi kegiatan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas lahan masyarakat.

Kepala BWS Wilayah IV Sulawesi Tenggara, Muhammad Harliansyah, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur. Karena itu, kesiapan operasi dan pemeliharaan menjadi persyaratan penting dalam proses hibah. "Salah satu syarat mutlak serah terima hibah ini adalah surat pernyataan kesiapan Operasi dan Pemeliharaan (O dan P). Ini menjadi tanggung jawab penuh kepala daerah demi memastikan keberlangsungan dan fungsi jangka panjang jaringan irigasi air tanah yang telah dibangun," ujarnya.

Agus Salim, selaku Kasatker Pembangunan BWS Wilayah IV, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Asta Cita Presiden untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Integrasi data dan perencanaan dilakukan melalui aplikasi Sipuri dengan melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan itu, Harliansyah juga menyampaikan proyeksi peningkatan alokasi anggaran pembangunan jaringan irigasi untuk Baubau pada 2026 hingga sekitar Rp20 miliar. Sementara itu, Yusran Fahim mengapresiasi kemitraan dengan BWS Wilayah IV dan mengusulkan tambahan program pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan serta percepatan rehabilitasi tanggul sungai guna mengurangi risiko banjir yang mengancam permukiman dan lahan pertanian warga.

Penguatan irigasi tersebut memiliki relevansi dengan sejarah pembangunan pangan Indonesia. Sejak Repelita I pada 1969, rehabilitasi dan perluasan jaringan pengairan menjadi bagian penting pembangunan pertanian. Dukungan infrastruktur irigasi turut mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 dengan produksi sekitar 25,8 juta ton. Dalam konteks global, FAO mencatat bahwa sekitar 23 persen lahan pertanian dunia telah dilengkapi fasilitas irigasi dan menghasilkan sekitar 48 persen nilai produksi tanaman global. Catatan tersebut memperlihatkan pentingnya pengelolaan air secara berkelanjutan untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. (*)

Buton Selatan Perkuat Pencegahan Malaria, 1.000 Kelambu Berinsektisida Disalurkan

Pemilihan Sulawesi Tenggara, Wa Ode Rabia Al Adawiyah Ridwan, S.E., M.B.A., untuk mendukung pencegahan penularan malaria, terutama di kawasan terpencil.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Jumat (23/10/2026). Kecamatan Batuatas menjadi salah satu wilayah prioritas dalam rencana pendistribusian kelambu karena membutuhkan dukungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.

Kelambu berinsektisida merupakan salah satu intervensi pencegahan malaria dengan mengurangi kontak antara manusia dan nyamuk Anopheles yang dapat menularkan parasit malaria. Penggunaannya terutama saat tidur diharapkan membantu melindungi masyarakat dari gigitan nyamuk pembawa penyakit tersebut.

Sejarah pemberantasan malaria di Indonesia menunjukkan bahwa pengendalian penyakit ini membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mulai menjalankan program pembasmian malaria secara terorganisasi pada 1959 melalui Komando Pembasmian Malaria (KOPEM), dengan dukungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga internasional lainnya. Program tersebut antara lain dilakukan melalui penyemprotan insektisida dan perlindungan masyarakat dari nyamuk.

Dalam sejarah internasional, WHO meluncurkan Global Malaria Eradication Programme pada 1955 sebagai bagian dari upaya membebaskan dunia dari malaria. Meski target pemberantasan secara global belum tercapai dan pendekatannya kemudian mengalami perubahan, pengendalian vektor nyamuk tetap menjadi bagian penting strategi kesehatan masyarakat hingga saat ini.

Bagi Buton Selatan, bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan lintas pihak dalam memperluas perlindungan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah berharap kelambu yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menjangkau warga yang membutuhkan.

Dukungan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan malaria melalui penggunaan kelambu berinsektisida, pengendalian lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada penyakit malaria.(*)

Site Plan SNT Buton Tengah Segera Dirilis, Bupati Azhari Perkuat Koordinasi dengan Kemendikdasmen

ab Buton Tengah siap memastikan seluruh kesiapan di lapangan berjalan optimal demi peningkatan mutu pendidikan daerah," kata Azhari.

Pembangunan SNT dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam satu lingkungan. Model tersebut diharapkan memperluas akses belajar, memperkuat kesinambungan pendidikan ant jenjang, serta memberikan kesempatan memperoleh layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah.

Secara nasional, pendekatan pengintegrasian layanan pendidikan bukan hal baru. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program SD-SMP Satu Atap sejak 2005, terutama untuk wilayah terpencil dan sulit dijangkau, agar lulusan sekolah dasar lebih mudah melanjutkan pendidikan. Data historis yang dikutip dalam kajian pendidikan nasional juga mencatat, program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pendidikan dasar.

Pada tingkat internasional, komitmen memperluas akses pendidikan sejak usia dini telah mengemuka dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand, pada 5-9 Maret 1990. Deklarasi yang dihasilkan menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan belajar setiap orang, termasuk pendidikan anak usia dini. Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui Kerangka Aksi Dakar pada 2000 dan menjadi bagian dari agenda pendidikan global.

Dengan masuknya Buton Tengah dalam kelompok 31 daerah yang dipersiapkan untuk perilisan site plan 2026, pemerintah kabupaten berharap pembangunan SNT dapat segera ditindaklanjuti. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menambah infrastruktur pendidikan, tetapi juga memperkuat pemerataan kesempatan belajar dan kualitas sumber daya manusia di Buton Tengah.(*)

PELNI Baubau Beralih ke Tiket Digital, 14 Agen Perjalanan Tak Lagi Bermitra

kerja sama tidak berarti agen perjalanan dilarang menjual tiket. Mereka tetap dapat menjalankan usaha secara mandiri tanpa memperoleh kuota khusus dari perusahaan.

"Mulai Januari 2027, kerja sama dengan travel agent tidak diperpanjang lagi. Namun, mereka masih bisa melakukan penjualan tiket, hanya saja sudah tidak ada ikatan kerja sama dengan pihak PELNI," kata Lutfi, Selasa (27/10/2026).

Selama menjadi mitra resmi, agen perjalanan memperoleh alokasi atau kuota tiket tertentu. Setelah kebijakan baru berlaku, mekanisme tersebut dihapus sehingga agen memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat umum untuk mendapatkan tiket. Penjualan mandiri masih dimungkinkan melalui kerja sama dengan kanal perbankan dan pembayaran digital, antara lain BRImo, Livin by Mandiri, dan myBCA.

Perubahan tersebut merupakan bagian dari penguatan digitalisasi layanan transportasi laut. Melalui aplikasi PELNI Mobile, calon penumpang dapat memeriksa jadwal kapal, mengetahui ketersediaan tempat duduk, melakukan pembelian tiket, serta mengakses informasi pelayaran. Penumpang juga didorong menggunakan tiket digital yang dapat ditunjukkan melalui telepon seluler untuk dipindai petugas sebelum keberangkatan.

Peralihan ini bukan sekadar perubahan saluran transaksi, melainkan bagian dari perkembangan sistem pelayanan transportasi yang semakin mengandalkan teknologi. Secara historis, industri pelayaran nasional telah bergerak dari sistem pemesanan dan administrasi konvensional menuju layanan elektronik. Secara internasional, digitalisasi tiket juga berkembang seiring penerapan pemesanan daring dan tiket elektronik pada sektor penerbangan, kereta api, serta transportasi laut. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur dan kemampuan pengguna.

Lutfi mengatakan, sosialisasi penggunaan PELNI Mobile telah berlangsung hampir satu tahun. Langkah tersebut dilakukan karena sebagian penumpang masih terbiasa mencetak tiket melalui vending machine. Perusahaan juga membatasi jumlah tiket yang dapat dibeli melalui setiap akun untuk mengendalikan transaksi dan mencegah praktik percaloan.

Meski pembelian tiket perorangan tidak lagi dilayani di loket, kantor PELNI Baubau tetap menyediakan pelayanan informasi, pembatalan tiket sesuai ketentuan, dan pengurusan tiket rombongan. Pemesanan rombongan harus diajukan jauh hari melalui surat kepada kantor pusat untuk proses pengalokasian tempat duduk. Nama seluruh peserta wajib dipastikan sesuai dengan KTP.

PELNI juga menghadapi tantangan dalam mendampingi penumpang lanjut usia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Lutfi berharap keluarga dapat membantu mereka dalam proses pembelian maupun penggunaan tiket digital. Dengan demikian, transformasi layanan mulai 2027 diharapkan tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga tetap menjaga aksesibilitas pelayanan bagi seluruh calon penumpang.(*)

Selasa, 03 November 2026 BAUB AU POST www.baubaupost.com

Forkopimda Baubau Bentuk Satgas, Tujuh SPBU Jadi Sasaran Pengawasan BBM



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terpadu. Langkah ini ditempuh untuk mengurai antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mencegah penyimpangan distribusi, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda di Aula Rapat Lantai II Kantor Wali Kota Baubau, Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kamis (29/10/2026), mulai pukul 10.00 Wita. Pertemuan itu juga membahas penyelesaian sengketa lahan di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, serta antisipasi gangguan keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satu keputusan penting rapat adalah menempatkan personel Polres Baubau di tujuh SPBU untuk mengawasi proses penyaluran BBM dan menindak pelanggaran ketentuan minyak dan gas bumi (migas). Seluruh SPBU juga diwajibkan mengoptimalkan penggunaan nosel pengisian serta tidak melayani pembelian menggunakan jeriken maupun tangki rakitan.

Perwakilan Polres Baubau dalam rapat tersebut melaporkan bahwa personel kepolisian telah diterjunkan untuk mengawasi aktivitas di SPBU. Petugas juga telah mengamankan sejumlah pengguna tangki rakitan yang umumnya berasal dari luar Kota Baubau.

Dari aspek penegakan hukum, perwakilan Kejaksaan Negeri Baubau mengingatkan bahwa pelayanan SPBU kepada pengecer dapat melanggar ketentuan perundang-undangan. Praktik tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan dan penindakan diminta berjalan konsisten dengan mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Baubau.

Di sisi pasokan, pimpinan TBBM Baubau memastikan ketersediaan BBM di daerah tersebut dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan, sejak pekan rapat berlangsung, operasional penyaluran BBM dipercepat mulai pukul 06.00 hingga 21.00 Wita. Setiap SPBU juga memperoleh tambahan kuota sebesar 30 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., Ketua DPRD Ardin Jufri, S.T., dan Sekretaris Daerah La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., bersama unsur terkait menilai persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM, tetapi juga pola distribusi yang belum optimal serta potensi penyimpangan oleh oknum tertentu. Pemerintah kota tidak memilih menerapkan sistem ganjil-genap kendaraan dan lebih mengutamakan pembenahan distribusi serta pengawasan langsung.

Untuk mendukung langkah tersebut, Satgas Pengawasan Terpadu akan melibatkan Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, Dinas Perhubungan, Disperindagkop, Satpol PP, serta Bagian Ekonomi dan Hukum Sekretariat Daerah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga dijadwalkan memeriksa operasional SPBU, dengan prioritas penambahan pasokan bagi kawasan pertanian melalui SPBU Bungi dan Sorawolio.

Rapat turut mengusulkan pengalihan pengisian BBM jenis solar bagi kendaraan truk ke SPBU di luar kota. Opsi tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan di dalam wilayah perkotaan sehingga aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas tidak terus terganggu oleh antrean pengisian BBM.

Selain persoalan energi, Forkopimda menyepakati pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (Poskamling) atau pos jaga di wilayah yang dinilai rawan, yakni Batupoaro, Murhum, Wolio, Betoambari, dan Lea-Lea. Langkah ini menjadi bagian dari mitigasi potensi konflik akibat antrean BBM serta peningkatan kewaspadaan terhadap kasus pencurian emas menjelang Nataru. Camat dan lurah diminta aktif berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Baubau, Ketua DPRD, perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres Baubau, Danposal Baubau, Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD terkait, pimpinan TBBM Baubau, camat, dan lurah. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan memastikan pengawasan BBM, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan berjalan secara terpadu.

Persoalan distribusi BBM bersubsidi sendiri bukan hanya menjadi tantangan Baubau. Secara nasional, pemerintah telah lama mengatur penyaluran BBM melalui kebijakan subsidi dan pengawasan distribusi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 menjadi salah satu landasan penindakan terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Di tingkat internasional, krisis energi global, terutama setelah gejolak harga minyak pada 1973, menunjukkan bahwa ketersediaan energi, distribusi, dan stabilitas pasokan merupakan persoalan strategis yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.

Melalui pembentukan satgas, pengawasan tujuh SPBU, penambahan pasokan, dan pengaktifan kembali Poskamling, Forkopimda Baubau berupaya memastikan persoalan antrean BBM tidak berkembang menjadi gangguan sosial. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran, sekaligus mempertahankan situasi keamanan yang kondusif menjelang akhir tahun.(*)

Disperindagkop Baubau Awasi Ketat Distribusi BBM, Antrean SPBU Mulai Terurai



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyusul antrean kendaraan yang berlangsung selama sepekan terakhir. Selain mendorong penambahan kuota dan percepatan pasokan dari Pertamina, pemerintah juga menyoroti dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi, terutama penggunaan tangki modifikasi dan pengisian berulang oleh kendaraan tertentu.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Baubau, Suarmawati, S.Si., M.Si., mengatakan upaya penanganan mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan pemantauan pada Rabu dan Kamis, antrean kendaraan di sejumlah SPBU berangsur terurai dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah meminta Pertamina mempercepat pengiriman BBM dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) ke SPBU. Jadwal pengisian yang sebelumnya dimulai pukul 06.00 Wita dimajukan menjadi pukul 03.00 Wita agar pasokan tersedia lebih awal. Sementara itu, pelayanan pembelian BBM kepada masyarakat di SPBU dimulai pukul 06.00 Wita.

Suarmawati menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengetahui alokasi kuota BBM setiap SPBU sekaligus mengusulkan penambahan pasokan. Usulan tersebut mendapat respons dari Pertamina sebagai bagian dari upaya mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.

"Alhamdulillah, setelah kami melakukan inspeksi mendadak bersama Forkopimda, Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, antrean tidak lagi seperti hari-hari sebelumnya dan hampir sudah teratasi," kata Suarmawati saat ditemui Jumat (30/10).

Di luar persoalan pasokan, pemerintah menaruh perhatian terhadap dugaan praktik pembelian BBM bersubsidi menggunakan kendaraan bertangki modifikasi. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi hak masyarakat yang mengantre untuk memperoleh BBM sesuai kebutuhan.

Pengawasan juga diarahkan pada pengisian menggunakan jeriken, pembelian berulang dalam waktu singkat, serta penggunaan pelat nomor kendaraan berbeda untuk menghindari ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Petugas SPBU diminta mencocokkan identitas kendaraan dengan barcode sebelum melakukan pengisian.

Suarmawati meminta masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan dengan mendokumentasikan dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Dinas Perindagkop dan UKM. Laporan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan terhadap SPBU yang diduga tidak menjalankan ketentuan penyaluran BBM.

"Jika masyarakat menemukan hal seperti ini, tolong didokumentasikan, kemudian dilaporkan kepada Dinas Perindagkop agar kami bisa langsung menindaklanjuti," ujarnya.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penyegelan atau penghentian operasional. Pengawasan juga mencakup larangan pengisian BBM bersubsidi bagi bus pada SPBU yang menyalurkan produk tersebut, sebagaimana disampaikan Suarmawati.

Pemerintah turut meminta pengelola SPBU mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian. Suarmawati mencontohkan SPBU Haji Karim yang diminta mengoperasikan empat nosel Pertalite yang tersedia, bukan hanya satu nosel sebagaimana ditemukan dalam pemantauan. Perindagkop dan UKM juga merencanakan pemeriksaan tera pada pukul 07.00 Wita untuk memastikan fasilitas pengisian berfungsi sesuai ketentuan.

Terkait penjualan BBM melalui warung pengecer, Suarmawati mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan ketentuan penjualan BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Ia menegaskan Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang penyalurannya diatur secara khusus sehingga distribusinya perlu diawasi agar tidak menyimpang dari peruntukan.

Secara nasional, pengaturan penyaluran BBM bersubsidi memiliki landasan historis melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Kebijakan pengendalian distribusi kemudian diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendaftaran konsumen. Program Subsidi Tepat Pertamina mulai membuka pendaftaran pada 1 Juli 2022 sebagai bagian dari upaya memastikan BBM bersubsidi diterima kelompok konsumen yang berhak.

Persoalan subsidi energi juga menjadi perhatian internasional. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat subsidi konsumsi bahan bakar fosil global menembus lebih dari 1 triliun dolar AS pada 2022, rekor tertinggi saat krisis energi dunia dipicu antara lain oleh perang Rusia-Ukraina. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan BBM bukan hanya menyangkut ketersediaan pasokan, tetapi juga ketepatan distribusi, kemampuan pemerintah mengendalikan subsidi, dan perlindungan konsumen. (*)